

## **PERPUSTAKAAN UMUM BERBASIS INKLUSI SOSIAL: APA DAN BAGAIMANA PENERAPANNYA? (SEBUAH KAJIAN LITERATUR)**

**Reza Mahdi**

LibExcellent

*Email: reza.m@libexcellent.com*

### **Abstrak**

Jika kita melihat definisi perpustakaan umum itu sendiri yaitu perpustakaan yang digunakan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa memandang bulu baik dari gender, kondisi fisik, ras, etnis, agama, status sosial, dan ekonomi. Itu berarti konsep inklusi sosial sangatlah cocok untuk diimplementasikan di perpustakaan tersebut. Paradigma perpustakaan umum terkini adalah sebagai wahana masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka sehingga mengarah pada peningkatan taraf hidup. Perihal konsep inklusi sosial, tentu memiliki hubungan dengan perpustakaan umum karena sama-sama menyinggung mengenai kesetaraan. Inklusi sosial berarti upaya dalam membuat masyarakat saling terbuka terutama pada masyarakat rentan atau berpotensi termarginal salah satunya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi literatur yaitu mengumpulkan dan menganalisis literatur sebagai sumber data. Untuk pemeriksaan keabsahan data dilakukan triangulasi sumber data dengan cara mencari data lain untuk memperkuat data sebelumnya. Pada penelitian ini ditemukan bahwa perpustakaan umum berbasis inklusi sosial berarti perpustakaan umum yang senantiasa menjamin fasilitas dan layanannya agar dapat mendorong masyarakat untuk saling terbuka terhadap lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membangun perpustakaan umum berbasis inklusi sosial yaitu (1) adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan (2) hak mendapatkan layanan perpustakaan, dan (3) aksesibilitas informasi perpustakaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perpustakaan umum sangat erat kaitannya dengan konsep inklusi sosial sehingga dapat menerapkan konsep tersebut. Hal itu tentu melihat dari perpustakaan umum itu sendiri yang bersifat mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu.

Kata Kunci: perpustakaan umum, inklusi social, perpustakaan – sosial dan budaya

*Abstract*

*If we look at the definition of a public library itself, namely a library that is used as a means of lifelong learning regardless of gender, physical condition, race, ethnicity, religion, social and economic status. That means the concept of social inclusion is very suitable to be implemented in the library. The latest public library paradigm is as a vehicle for people to develop their potential so that it leads to an increase in living standards. Regarding the concept of social inclusion, of course, it has a relationship with public libraries because they both talk about equality. Social inclusion means efforts to make society open to one another, especially to vulnerable or potentially marginalized communities, one of which is through community empowerment activities. This research is a qualitative study using the literature study method, namely collecting and analyzing the literature as a data source. To check the validity of the data, data source triangulation was carried out by looking for other data to strengthen the previous data. In this study, it was found that a public library based on social inclusion means a public library that always guarantees its facilities and services in order to encourage people to be open to one another. Several things that need to be considered in building a public library based on social inclusion, namely (1) the existence of community empowerment activities, and (2) the right to get library services, and (3) the accessibility of library information. Therefore it can be concluded that public libraries are closely related to the concept of social inclusion so that they can apply the concept. Of course, this can be seen from the public library itself which has the character of protecting all levels of society without a reed perspective.*

*Keywords: public library, social inclusion, library – social and culture*

## **A. PENDAHULUAN**

Pembicaraan mengenai perpustakaan umum dimulai dari membicarakan fungsi perpustakaan sebagai pusat belajar sepanjang hayat (Safira, 2019; Zen & Wuryani, 2011). Hal tersebut memiliki arti bahwa masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan berupa ilmu pengetahuan atau keterampilan jenis apapun. Jika melihat dalam UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan dapat dikatakan bahwa perpustakaan umum memperhatikan seluruh masyarakat tanpa pandang bulu sehingga konsep inklusi sosial sangat berkaitan dengan perpustakaan tersebut.

Perihal konsep inklusi sosial, pada hakikatnya adalah upaya untuk membuat seluruh lapisan masyarakat terbuka dengan yang lain. Hal tersebut juga dinyatakan oleh World Bank (2013) yakni inklusi sosial merupakan proses peningkatan martabat dan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi atau mengambil peran dalam masyarakat dengan baik. Inklusi Sosial sekarang ini banyak dibicarakan secara global sejak program

untuk kemaslahatan umat manusia dan lingkungan yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Kata *leaving no one behind* (jangan tinggalkan siapapun) merupakan salah satu poin utama yang pada akhirnya nanti merujuk pada inklusi sosial (UNDESA, 2016; United Nations System Staff College, 2015).

Oleh karena itu terdapat dua hal yang dijelaskan di dalam tulisan ini yakni mengenai perpustakaan umum berbasis inklusi sosial itu sendiri dan cara mewujudkan konsep inklusi sosial di perpustakaan. Selain itu juga dipaparkan fakta-fakta terkait dengan kegiatan di perpustakaan umum baik itu yang berlokasi di kota/kabupaten dan desa. Dari tulisan ini diharapkan akan menambah ilmu baru bagi akademisi maupun praktisi dibidang perpustakaan terkait dengan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **Perpustakaan Umum**

Pada standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan RI pada tahun 2011 tertulis bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukkan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat (Zen & Wuryani, 2011). Lebih lanjut, perpustakaan umum memberikan layanan tanpa memandang ras, kebangsaan, usia, jenis kelamin, agama, bahasa, difabel, status sosial, dan ekonomi (IFLA, 2010). Dari penjelasan yang ada, perpustakaan umum sangat berperan dalam mempromosikan aspek multikultural dalam melayani masyarakatnya. IFLA & UNESCO (2012) menjelaskan aspek multikultural yaitu kesetaraan dalam mengakses informasi dan pengetahuan dibalik perbedaan budaya yang ada pada setiap masyarakatnya.

Terkait dengan koleksi, IFLA (2016) menyebutkan bahwa koleksi perpustakaan umum mencerminkan tren saat ini dan evolusi masyarakat, serta ingatan akan upaya dan imajinasi manusia. Selain itu, perpustakaan ini juga memiliki peran penting bagi komunitas yang ada. Pusat informasi dengan akses gratis, membentuk generasi yang literat, pembelajaran, dan tentu sebagai

promotor dari warisan kebudayaan. Hal ini tentu dapat membentuk kepercayaan dari masyarakat bahwa perpustakaan umum bisa bermanfaat bagi mereka (Vårheim et al., 2008).

Di samping itu, keterlibatan masyarakat siapa pun itu bagi yang berpendidikan rendah ataupun tinggi serta dari bermacam tingkat status ekonomi maupun sosial yang berpartisipasi dalam layanan perpustakaan umum merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh pengelola perpustakaan umum. Oleh karena itu, perpustakaan umum memiliki peran untuk memfasilitasi masyarakatnya sebagai ruang pertemuan antarmasyarakat (Aabø et al., 2010).

### **Inklusi Sosial**

Konsep inklusi sosial datang dari suatu istilah yang disebut dengan eksklusi sosial yang berarti di mana kondisi suatu masyarakat yang merasa dirinya berbeda dengan masyarakat lainnya. Lebih lanjut, Power & Wilson (2000) menjelaskan hal tersebut adalah mengenai ketidakmampuan dari suatu kelompok ataupun individu untuk menjaga diri mereka agar bisa berbaur dengan masyarakat umum.

Mereka cenderung memisahkan diri dari masyarakat umum merasa tidak tergolong dari masyarakat umum atau merasa eksklusi. Lebih lanjut, eksklusi sosial bisa datang dari berbagai faktor, misalnya warna kulit yang berbeda, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi seseorang atau masyarakat, yang efeknya mencegah mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat (Charity Commission, 2011; Noor, 2019).

Hal tersebut yang membuat konsep baru muncul berupa inklusi sosial. Konsep ini membangun masyarakat agar semakin terbuka dengan masyarakat lainnya, meningkatkan partisipasi mereka dalam masyarakat. Cara ini dilakukan melalui peningkatan peluang, akses ke sumber daya, dan rasa hormat bagi mereka (Leonir, 1974 (dalam Warsilah, 2015; (UNDESA, 2016). Lebih lanjut, pada akhirnya akan mengangkat martabat masyarakat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, 2019). Charity Commission (2011) menyatakan ada enam cara untuk mempromosikan inklusi sosial sebagai berikut.

- 1) Memberikan saran dan bantuan kepada masyarakat yang berpotensi tereksklusi seperti dengan membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada mereka sehingga partisipasi mereka dapat bertambah
- 2) Melakukan penelitian mengenai masyarakat yang sudah atau berpotensi tereksklusi sehingga diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk memberikan bantuan kepada mereka
- 3) Kampanye mengenai pendidikan dan pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat yang sudah atau berpotensi tereksklusi, dilakukan secara masif untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya memberdayakan mereka.
- 4) Kegiatan regenerasi untuk mengubah dan meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.
- 5) Membentuk suatu jaringan guna menghubungkan kelompok di area yang terkait dengan berbagai masalah sehingga dapat memengaruhi komunitas tertentu untuk memungkinkan mereka membuat hal yang lebih efektif dan turut bergabung.
- 6) Meningkatkan atau mengoordinasikan peluang bagi organisasi tertentu seperti LSM maupun pemerintahan untuk berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat.

Oleh karena itu konsep inklusi sosial ini perlu dipromosikan dengan baik untuk meningkatkan kesadaran baik dari kalangan akademisi maupun praktisi untuk saling membantu dalam memberdayakan masyarakat. Ketika semua masyarakat sudah saling bahu membahu dalam memberdayakan satu sama lain maka akan terciptanya suasana di mana masyarakat yang saling menyukai, mengayomi, dan percaya sehingga dapat mudah untuk mencapai tujuannya.

### **C. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Metode tersebut dilakukan dengan cara menelusuri teori-teori yang relevan dari hal yang ingin diteliti. Lebih lanjut, pada metode tersebut bahan pustaka seperti buku atau artikel seperti jurnal dan laporan penelitian digunakan sebagai sumber data (Mahdi & Ma'rifah, 2019; Melfianora, 2017). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada metode ini, peneliti tidak melakukan studi ke lapangan dikarenakan hanya berfokus pada pengambilan dan analisis data dari literatur.

Pada penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti sangat penting dikarenakan peneliti sebagai instrumen utama. Hal ini dinyatakan oleh Moleong (2017) bahwa peneliti di sini yakni sebagai peneliti sebagai pengumpul data, analisis, bahkan sampai pembuat laporan penelitian. Alhamid & Anufia (2019) menambahkan bahwa peneliti di sini berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya baik manusia maupun non-manusia (seperti dokumen maupun literatur) yang sesuai dengan topik yang diteliti. Karena itulah, peneliti pada penelitian kualitatif diharuskan memiliki wawasan yang kuat mengenai topik yang diteliti.

Setelah itu, terkait dengan pemeriksaan keabsahan data, peneliti melakukannya dengan cara triangulasi sumber data. Mamik (2015) menyatakan bahwa triangulasi sumber data merupakan menggali kebenaran informasi melalui berbagai macam data baik itu dari sumbernya maupun metode pengumpulannya. Pada penelitian ini, dikarenakan literatur sebagai sumber data, maka peneliti mencari berbagai literatur baik itu yang berisikan fakta lapangan maupun teori untuk memperkuat data yang ada.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Apa itu Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial?**

Pada penerapannya di perpustakaan, konsep inklusi sosial ini cocok untuk diimplementasikan di perpustakaan umum. Hal ini karena perpustakaan umum merupakan lembaga informasi dan sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi

seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan yang ada. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan umum berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan umum yang memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat dengan melihat potensinya tanpa pandang bulu, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berkembang dan saling berbaur satu sama lain.

Perpustakaan yang menekankan pada konsep inklusi sosial senantiasa mendorong masyarakat saling memberdayakan satu sama lain sehingga memunculkan kepercayaan dan rasa saling memiliki. Di sini kenyamanan bagi masyarakat untuk berkarya dan berekspresi di perpustakaan umum tanpa adanya batasan sosial, agama, ras, kondisi fisik maupun ekonomi merupakan hal utama. Nantinya akan banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan atau layanan yang disediakan oleh perpustakaan umum di daerah atau kotanya karena kenyamanan tadi.

### **Bagaimana Mewujudkan Konsep Inklusi Sosial di Perpustakaan Umum?**

Perwujudan konsep inklusi sosial di perpustakaan tentu juga dilakukan dengan kerjasama yang baik antara perpustakaan dan masyarakat. Ini dikarenakan luaran dari konsep tersebut adalah menjadikan perpustakaan pusat sebagai pusat aktivitas masyarakat secara beragam. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam membangun konsep inklusi sosial pada perpustakaan sebagai berikut.

#### 1) Adanya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Perpustakaan umum yang menekankan pada konsep inklusi sosial, menjadikannya sebagai media bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi diri (Utami & Prasetyo, 2019). Jadi, perpustakaan yang berbasis inklusi sosial tidak hanya menyediakan buku untuk membaca saja, namun juga menjadikannya sebagai ruang untuk berkarya dan berkegiatan bagi masyarakat (*makerspace*). Perpustakaan menyelenggarakan kegiatan untuk masyarakat dalam mengembangkan potensi diri misalnya pelatihan menulis, wirausaha, memasak, dan lain-lain. Masyarakat

ditingkatkan kinerja dalam melakukan pengembangan diri demi menuju masa depan yang lebih baik (Salam, 2018).

Koleksi bahan bacaan di perpustakaan juga bisa menjadi media bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing. Dengan demikian, pengadaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan mencerminkan kondisi masyarakat sekitar serta melihat dari permintaan masyarakat (Mahdi, 2020). Sebagai contoh ketika masyarakat ingin mempelajari dan mempraktikkan cara membuat kerajinan dari kayu, pustakawan merekomendasikan koleksi untuk masyarakat yang berminat. Jika koleksinya tidak ada, maka dapat dijadikan catatan untuk pengadaan kedepannya. Pihak perpustakaan kemudian melakukan kajian terkait dampak yang mereka dapatkan setelah membaca semisal setelah membaca buku mengenai kerajinan kayu selama 1 bulan, terdapat seseorang yang pada akhirnya membuka usaha berupa bisnis kerajinan kayu.

Pemberdayaan masyarakat yang ada di perpustakaan dapat menimbulkan partisipasi masyarakat secara penuh dalam mewujudkan kota/daerah yang inklusif. Bagi masyarakat difabel, telah ditulis dalam UU No. tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 40 Ayat 2, yaitu masyarakat difabel disiapkan fasilitas untuk berpartisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial (Maftuhin, 2017). Hal tersebut juga bisa diterapkan untuk golongan masyarakat lainnya, seperti masyarakat taraf ekonomi rendah, serta masyarakat minoritas lainnya yang ingin belajar dan melakukan pengembangan diri dengan suatu lembaga yang menyediakan fasilitas dan sarana untuk mereka.

## 2) Hak mendapatkan Layanan Perpustakaan secara Menyeluruh

Maftuhin (2017) menuliskan perhatian terhadap hak masyarakat difabel dilakukan dengan memberikan mereka layanan dan fasilitas dalam mewujudkan kota/daerah yang inklusif. Namun, untuk membangun kawasan yang inklusif, pemerintah atau masyarakat juga memperhatikan masyarakat berpotensi termarginal lainnya seperti status sosial, ekonomi, ras,

etnis, umur, dan agama (UNDESA, 2016). Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan dari lembaga atau masyarakat umum.

Perpustakaan umum menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mengakses fasilitas dan layanan di perpustakaan. Hal itu tidak hanya akses terhadap sumber informasi di perpustakaan, namun juga bisa meliputi hak masyarakat untuk berkegiatan di sana. Jika melihat pada konteks perpustakaan umum, pada Standar Nasional Perpustakaan Umum (2011) dituliskan secara garis besar bahwa perpustakaan umum memberikan layanan tanpa membedakan seluruh jenis lapisan masyarakat. Lebih lanjut, IFLA (2010) juga menyatakan bahwa perpustakaan umum melayani seluruh masyarakat dengan setara tanpa membeda-bedakan.

Sebagai contoh jika ada suatu komunitas difabel yang ingin membuat acara seperti peningkatan kreativitas, maka perpustakaan umum harus memperbolehkan mereka dalam berkegiatan. Pustakawan senantiasa menyambut mereka dengan ramah dan membantu jalannya kegiatan yang mereka selenggarakan. Selain itu, pada contoh lain misalnya terdapat suatu komunitas ras tau etnis tertentu yang ingin membuat acara, secara inklusif hal itu sangat diperbolehkan melihat fungsi perpustakaan umum yang sudah dijelaskan sebelumnya.

### 3) Aksesibilitas Informasi Perpustakaan

Aksesibilitas yang dimaksud adalah kemudahan bagi seluruh masyarakat mengakses fasilitas di perpustakaan maupun informasi di sana. Pada UU No. 8 Thn. 2016 fasilitas yang disebutkan antara lain yaitu jalan, jembatan, transportasi, informasi umum, layanan publik yang terjangkau dari segi jarak dan biaya, serta layanan peradilan. Bagi mereka yang eksklusif, selain masyarakat difabel, perhatian juga dilakukan terhadap akses terhadap fasilitas maupun layanan dari lembaga yang diperuntukan untuk masyarakat umum.

Perpustakaan bisa memperhatikan hal tersebut misalnya dengan mengadakan perpustakaan keliling bagi masyarakat yang perekonomiannya

rendah maupun difabel sehingga tidak dapat sewaktu-waktu pergi ke perpustakaan tetap. Aplikasi perpustakaan juga dapat berperan bagi masyarakat yang berlokasi jauh sehingga tidak mampu untuk pergi ke perpustakaan tetap (Noor, 2019). Bagi masyarakat difabel, perpustakaan bisa menambahkan koleksi braille bagi tuna netra serta memperhatikan jalan akses bagi masyarakat tuna daksa atau cacat fisik lainnya.

Ketiga aspek tersebut bisa dijalankan melalui kerjasama yang dilakukan oleh pihak perpustakaan umum dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah. Lebih lanjut, Baba & Abrizah (2018) menuliskan bahwa dalam melakukan revitalisasi fungsi perpustakaan sebagai media pemberdayaan masyarakat, aspek yang perlu diperhatikan dari segi pustakawan itu sendiri adalah bagaimana mereka memberikan pengaruh bagi masyarakat menjalin semacam relasi maupun kerja sama dalam membuat suatu program. Kemitraan bisa dilakukan dengan masyarakat lokal dengan pemerintah maupun swasta demi berdayanya suatu masyarakat. Pemanfaatan sumber daya yang ada di suatu masyarakat bisa mempengaruhi jalannya pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachman et al. (2019) di Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca (GGM) Malang, ditemukan bahwa pihak perpustakaan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam membuat kegiatan daur ulang sampah yang diikuti oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan mereka. Selain untuk masyarakat, terdapat kegiatan yang diselenggarakan khusus untuk pengurus perpustakaan tersebut yakni pelatihan pengelolaan perpustakaan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang. Hal itu mengindikasikan bahwa sudah ada perhatian yang baik dari pihak perpustakaan desa kepada masyarakat maupun pengurus perpustakaan itu sendiri, melihat dari identifikasi kebutuhan mereka. Tentunya kerjasama yang dilakukan oleh Perpustakaan GGM dengan pemangku kepentingan di daerahnya, membuat kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

Fenomena lain juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahdi (2020) saat melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan di Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang yaitu A.M. Beliau menuturkan bahwa pihak perpustakaan memfasilitasi permintaan warga perempuan di sekitarnya dalam membuat kegiatan yaitu pengolahan tali kur. Dengan kerjasama yang dilakukan kepada Komunitas Magic Hand, kegiatan tersebut dihadiri dengan masyarakat melebihi sasaran yang ditetapkan oleh perpustakaan. A.M menuturkan bahwa dampaknya sudah ada yakni dapat menambah pendapatan dari keluarga mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perpustakaan umum masa kini juga mempunyai peran dalam menaikkan taraf hidup masyarakat dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh mereka.

Mengenai koleksi yang dapat menaikkan taraf hidup masyarakat, pada penelitian yang sama, Rachman et al., (2019) menemukan bahwa koleksi bacaan yang bermanfaat bagi warga sekitar Perpustakaan GGM adalah koleksi mengenai pertanian dan pengolahan hasil kebun menjadi makanan. Berkat koleksi tersebut, banyak warga yang melakukan pengembangan hasil kebun menjadi makanan berupa tiwul instan dan steak ikan. Koleksi mengenai pertanian juga senantiasa dimanfaatkan oleh warga desa sehingga dapat meningkatkan hasil pertaniannya.

Demikian juga temuan penelitian dari Mahdi (2020) yang menunjukkan, salah seorang warga bernama Ariadati yang tinggal di Desa Bener Meriah, Provinsi Aceh yang membuka usaha jamur tiram setelah membaca koleksi di perpustakaan desanya. Bermodal awal yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan ilmu yang didapat melalui perpustakaan, beliau membantu meningkatkan pendapatan keluarganya yang suaminya bekerja menjai satpam. Dua contoh tersebut merupakan bentuk perhatian dari perpustakaan umum dalam menjamin ketersediaan koleksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, Utami & Prasetyo (2019)

menuliskan bahwa dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, koleksinya diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.

Mahdi (2020) juga menemukan fenomena lain dari telaah yang dilakukan yakni kegiatan bagi masyarakat difabel dari salah satu perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah yaitu Perpustakaan Umum Kabupaten Kendal. Pihak perpustakaan menyelenggarakan kegiatan pelatihan memijat untuk difabel tuna netra, bekerjasama dengan DPC Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Kendal. Salah satu warga yang bernama Imam berhasil membantu pendapatan keluarga dengan membuka jasa pijat dari pelatihan yang beliau ikuti di perpustakaan.

Dari seluruh contoh yang sudah dijelaskan merupakan suatu contoh implementasi program yang dilaksanakan oleh perpustakaan umum dalam mewujudkan inklusi sosial. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan bagi seluruh lapisan masyarakat yaitu mereka yang termarginal secara ras, etnis, atau karena penyakit tertentu seperti mantan atau yang sedang menderita narkoba dan HIV/AIDS (ODHA). Hal itu dikarenakan tidak hanya melihat dari sisi kesehatan secara fisik namun secara psikologi misalnya mereka berpotensi untuk terpinggirkan karena apa yang diderita oleh mereka. Perpustakaan umum yang berbasis inklusi sosial juga turut mengayomi mereka dengan melakukan kegiatan pemberdayaan bagi mereka dan bisa bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.

## **E. PENUTUP**

Dari seluruh penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa konsep inklusi sosial sangat cocok diterapkan oleh perpustakaan umum melihat kedua hal tersebut sama-sama menyinggung perihal kesetaraan. Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial senantiasa memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat dengan melihat potensinya tanpa pandang bulu sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berkembang dan saling berbaur satu sama lain. Hal ini melihat dari tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya yaitu, (1)

adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat di perpustakaan, (2) perhatian terhadap hak seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan di perpustakaan, dan (3) aksesibilitas terhadap informasi di perpustakaan bagi semua lapisan masyarakat.

Ketiga aspek tersebut diperhatikan dengan melihat dari kaidah konsep inklusi sosial itu sendiri. Perpustakaan umum bisa mewujudkan konsep tersebut dengan melakukan kerjasama terhadap pemangku kepentingan terkait, sehingga nantinya banyak masyarakat yang sadar dan paham mengenai kebermanfaatannya dari keberadaan perpustakaan umum itu sendiri di daerah/kotanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aabø, S., Audunson, R., & Vårheim, A. (2010). How do public libraries function as meeting places? *Library and Information Science Research*, 32(1), 16–26. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2009.07.008>
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Instrumen pengumpulan data kualitatif. 111(479), 1009–1010. <https://doi.org/10.1192/bjp.111.479.1009-a>
- Baba, Z., & Abrizah, A. (2018). Transformation strategies in community engagement: Selected initiatives by Malaysian libraries. *IFLA Journal*, 44(2), 90–105. <https://doi.org/10.1177/0340035218778435>
- Charity Commission. (2011). The promotion of social inclusion. *Charity Commission, December*, 1–9. <https://doi.org/10.1080/03085148800000016>
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat. (2019). *Siti, sebuah bukti positif dari praktik inklusi sosial di perpustakaan jawa barat*. Laman Web Dipuspida Jawa Barat. <http://dispusipda.jabarprov.go.id/artikel/detail/19061316044544>
- IFLA. (2010). The mission and purposes of the public library. In C. Koontz & B. Gubbin (Eds.), *IFLA Public library service guidelines* (pp. 1–20). International Federation of Library Association. <https://doi.org/10.1515/9783110232271.1>
- IFLA, & UNESCO. (2012). *IFLA/UNESCO multicultural library manifesto-implementation kit*. December, 1–14. [https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/ifla-unesco-multicultural-library-manifesto\\_implementation-kit\\_2012-12.pdf](https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/ifla-unesco-multicultural-library-manifesto_implementation-kit_2012-12.pdf)

- International Federation of Library and Information Associations & Institutions. (2016). *IFLA/UNESCO public library manifesto 1994*. IFLA Webpage. <https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994>
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan kota inklusif: Asal-usul, teori dan indikator. *Tataloka*, 19(2), 93. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.93-103>
- Mahdi, R. (2020). Strengthening community economy inclusively through literacy for prosperity national library of Indonesia ' s role to support. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(2), 160–176. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i2.62>
- Mahdi, R., & Ma'rifah, M. (2019). Indigenous knowledge, kebudayaan daerah, dan peran perpustakaan sekolah dalam memperkenalkannya. *Seminar Nasional Ilmu Perpustakaan (SENASIP) 2019*, 1, 416–422. <http://semnasjsi.um.ac.id/index.php/senasip/senasip2019>
- Mamik. (2015). *Metodologi kualitatif* (N. Retnowati (ed.)). Zifatama Publisher.
- Melfianora. (2017). Penulisan karya tulis ilmiah dengan studi literatur. *Studi Litelatur*, 1–3.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Noor, M. U. (2019). Aplikasi layanan informasi berbasis internet untuk menumbuhkan inklusi sosial di perpustakaan daerah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4(1), 84–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.30829/jipi.v4i1.4122>
- Power, A., & Wilson, W. J. (2000). *Social exclusion and the future of cities Social Exclusion and the Future of Cities The State of American Cities*. February.
- Rachman, R. A., Sugiana, D., & Rohanda, H. (2019). Strategi sukses transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial untuk masyarakat sejahtera ( studi pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang ). *Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran 2019*, 907–918. [https://www.researchgate.net/publication/338983808\\_Strategi\\_Sukses\\_Transformasi\\_Perpustakaan\\_Desa\\_Berbasis\\_Inklusi\\_Sosial\\_untuk\\_Masyarakat\\_Sejahtera\\_Studi\\_Pada\\_Perpustakaan\\_Desa\\_Gampingan\\_Gemar\\_Membaca\\_Malang](https://www.researchgate.net/publication/338983808_Strategi_Sukses_Transformasi_Perpustakaan_Desa_Berbasis_Inklusi_Sosial_untuk_Masyarakat_Sejahtera_Studi_Pada_Perpustakaan_Desa_Gampingan_Gemar_Membaca_Malang)
- Safira, F. (2019). Peran perpustakaan dalam pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pelibatan masyarakat di Perpustakaan Umum Kabupaten Malang. *Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca Vol.*, 35(1), 23–32.
- Salam, A. (2018). Pemberdayaan masyarakat berbasis kebudayaan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 104–106. <https://doi.org/10.30653/002.201832.95>

Undang - Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. (2007). <https://www.perpusnas.go.id/law-detail.php?lang=id&id=170920114322Ir9g6HhRuc>

UNDESA. (2016). Identifying social inclusion and exclusion. In *Leaving no one behind: imperative on inclusive development* (pp. 17-31). <https://doi.org/10.18356/5890648c-en>

United Nations System Staff College. (2015). *The 2030 agenda for sustainable development*. [https://www.unssc.org/sites/unssc.org/files/2030\\_agenda\\_for\\_sustainable\\_development\\_kcsd\\_primer\\_en.pdf](https://www.unssc.org/sites/unssc.org/files/2030_agenda_for_sustainable_development_kcsd_primer_en.pdf)

Utami, D., & Prasetyo, W. D. (2019). Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. *Visi Pustaka*, 21(1), 29-35.

Vårheim, A., Steinmo, S., & Ide, E. (2008). Do libraries matter? Public libraries and the creation of social capital. *Journal of Documentation*, 64(6), 877-892. <https://doi.org/10.1108/00220410810912433>

Warsilah, H. (2015). Pembangunan inklusif sebagai upaya mereduksi eksklusi sosial perkotaan: Kasus kelompok marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(2), 207-232. <https://doi.org/10.14203/JMB.V17I2.283>

World Bank. (2013). *Inclusion matters: the foundation for shared prosperity* (Vol. 4, Issue 1). World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0010-8>.

Zen, Z., & Wuryani, I. (2011). Standar nasional perpustakaan kabupaten/kota. In *Standar Nasional Perpustakaan (SNP)*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.